

# STRATEGI TIONGKOK DALAM MEWUJUDKAN VISI *GREEN MIRACLE* MELALUI PEMBANGUNAN *GREEN CITY*

Masturah<sup>1</sup>, Sirwan Yazid Bustami<sup>1</sup>, Kurnia Zulhandayani Rizki<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

## ABSTRACT

*This paper aims to analyze the strategy used by Tiongkok in achieving sustainable development through an environmentally friendly development design called Green City. Green City was promoted by President Xi Jinping as a continuation of the previous environmental policy. The environmental damage that has occurred in Tiongkok has forced the country to make new policies in dealing with environmental damage which is getting worse day by day. International world pressure has also colored Tiongkok's steps in dealing with this problem, where Tiongkok is required to be able to achieve carbon neutrality in a short time in addition to maintaining economic progress. The formulation of the problem in this paper is "How is Tiongkok's Strategy in Realizing the Green Miracle Vision Through the Development of Green City". To answer the formulation of the problem, the author uses a framework of thinking, namely Green Theory, Decarbonization and International Cooperation.*

**Keywords:** *Sustainable Development, Green City, Green Miracle, Tiongkok's Environmental Damage, Clean Development Mechanism.*

## ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang digunakan Tiongkok dalam mencapai pembangunan berkelanjutan melalui rancangan pembangunan ramah lingkungan yang disebut dengan *Green City*. *Green City* diusungkan oleh presiden Xi Jinping sebagai lanjutan dari kebijakan lingkungan sebelumnya. Kerusakan lingkungan yang terjadi di Tiongkok membuat negara tersebut harus membuat kebijakan baru dalam menghadapi kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin memburuk. Tekanan dunia internasional juga turut mewarnai langkah Tiongkok dalam menghadapi permasalahan

tersebut, dimana Tiongkok dituntut untuk bisa mencapai netral karbon pada waktu yang singkat di samping mempertahankan laju ekonomi. Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah “Bagaimana Strategi Tiongkok dalam Mewujudkan Visi *Green miracle* Melalui Pembangunan *Green City*”. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan kerangka pemikiran yakni *Green Theory*, Dekarbonisasi dan Kerjasama Internasional.

**Kata Kunci: Pembangunan Berkelanjutan, *Green City*, *Green Miracle*, Kerusakan lingkungan Tiongkok, *Clean Development Mechanism*.**

## PENDAHULUAN

Tiongkok merupakan Negara Asia Timur dengan pertumbuhan pada sektor ekonomi dan militer yang paling signifikan di antara negara lainnya. Negara tirai bambu ini memiliki reputasi yang sangat baik dikarenakan kemajuan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang spektakuler sehingga sering dikatakan dengan berbagai julukan seperti keajaiban Tiongkok (*Tiongkok's miracle*), kemudian kebangkitan sang naga (*rise of the dragon*), dan beberapa julukan lainnya yang memuji kemajuan perekonomian Tiongkok.<sup>1</sup>

Tiongkok sebagai negara berkembang yang sedang membangun industri dalam negerinya, telah mendorong untuk penetapan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas pokok pembangunan. Sejak tahun 1970-an, Tiongkok dengan cepat mengejar ketertinggalannya dan mencapai kemajuan yang signifikan dalam perekonomiannya, ini menunjukkan tingkat pertumbuhan rata-rata Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebesar 9,8% untuk periode 1978-2008. Sekitar tahun 2009, di tengah menurunnya perekonomian global, Tiongkok mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan PDB-nya pada level 8,7%.<sup>2</sup>

Isu pencemaran lingkungan di Tiongkok, mulai muncul ketika pertumbuhan ekonomi dan industri menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Seiring dengan perkembangan positif tersebut, ternyata efek dari kemajuan tersebut membawa dampak buruk terhadap sektor lingkungan. Kerusakan lingkungan yang menimpa Tiongkok cukup serius, bersamaan dengan tingkat polusi air dan udara yang beberapa dekade ini terus meningkat.<sup>3</sup>

Permasalahan lingkungan yang terjadi di Tiongkok antara lain polusi udara, polusi air, polusi tanah, deforestasi, erosi, dan biodiversitas. Selain itu, dari dua puluh kota tercemar di dunia, sebanyak enam belas di antaranya berada di Tiongkok. Adanya tingkat polusi yang memburuk di Tiongkok disebabkan oleh pembangkit listrik tenaga batubara yang menjadi andalan bagi kebutuhan energinya. Menurut *World Economic Forum* (WEF) tahun 2012

---

<sup>1</sup>Dori Gusman and Tri Joko Waluyo, ‘Peran Greenpeace Dalam Penanganan Kerusakan Lingkungan (Polusi Udara Dan Air) Di Tiongkok’, *Jurnal Transnasional*, 6.2 (2015), 74.

<sup>2</sup> Hidayat Chusnul Chotimah, ‘Analisis Strategi Keamanan Energi Cina Dalam Upaya Penurunan Emisi Karbon Melalui Pendekatan Konstruktivisme’, *Global: Jurnal Politik Internasional*, 19.1 (2017), 29 <<https://doi.org/10.7454/global.v19i1.145>>.

<sup>3</sup> Gusman and Joko Waluyo.

Tiongkok menempati urutan pertama sebagai negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia.<sup>4</sup>

Kualitas lingkungan yang semakin memburuk menciptakan gelombang protes masyarakat menuntut adanya udara bersih, air yang tidak tercemar, dan membaiknya kondisi kesehatan masyarakat. Tercatat semakin banyak penduduk Tiongkok terkena kanker di wilayah-wilayah yang memiliki jumlah industri besar. Secara regional, pencemaran udara yang tinggi di Tiongkok telah mengganggu negara tetangga seperti, Jepang dan Korea. Polusi dan jumlah hujan asam memunculkan permasalahan tersendiri di Jepang dan Korea. Isu kerusakan lingkungan ini tentunya tidak hanya menjadi isu domestik, tapi juga menjadi isu regional dan internasional karena memberikan dampak yang luar biasa terhadap negara sekitarnya.<sup>5</sup>

Selain masalah tersebut, kelangkaan sumber daya alam, tekanan populasi yang berlebihan dan iklim serta ruang perkotaan yang terbatas, telah membuat kota-kota di Tiongkok rentan terhadap dampak perubahan iklim. Beberapa kota di Tiongkok bagian utara dan barat telah menghadapi beberapa dampak perubahan iklim seperti badai pasir, kekeringan, dan kabut asap, sedangkan kota-kota di bagian timur dan selatan Tiongkok mengalami badai hujan dan sering mengalami banjir. Menurut Liu dan Deng, kota-kota di Tiongkok utara mengalami penurunan sebesar 2% hingga 10% sementara kota-kota rawan banjir di Tiongkok selatan menghadapi curah hujan tahunan rata-rata lebih dari 20%. Beberapa kota di Tiongkok yaitu Shanghai, Guangzhou sudah menghadapi beberapa efek perubahan iklim seperti badai hujan di setiap musim panas.<sup>6</sup>

Tiongkok memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perusakan lingkungan. pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang sangat tinggi dengan angka 9% pertahun, memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kualitas lingkungan. Tiongkok sendiri telah melampaui Amerika Serikat sebagai negara dengan tingkat emisi CO<sub>2</sub> tertinggi di dunia. Sekitar tahun 2010, tingkat emisi Tiongkok naik sebesar 10,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sementara tingkat emisi global mencapai kecepatan tertingginya selama lebih dari dua dekade.<sup>7</sup>

Permasalahan lingkungan yang ada dianggap sebagai tantangan bagi Tiongkok untuk melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, serta dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan agenda besar negara-negara dunia untuk menciptakan wajah baru dalam pembangunan dunia. Pemerintah Tiongkok ditantang untuk dapat memformulasikan kebijakan pembangunan yang memiliki efek minimal terhadap lingkungan dan masyarakat. Pendekatan pembangunan berkelanjutan yang dilakukan meliputi kontrol terhadap pertumbuhan penduduk, minimalisasi efek negatif terhadap urbanisasi, pertanian dan restrukturisasi industri, efisiensi, pengembangan energi terbarukan, minimalisasi polusi, dan perlindungan lingkungan. Usaha-usaha pemerintah ini termasuk juga mengubah strategi pembangunan dari yang mengandalkan input tradisional berupa tenaga kerja, sumber daya fisik dan modal, beralih ke strategi lingkungan dan sumber daya

---

<sup>4</sup> Gusman and Joko Waluyo.

<sup>5</sup> Citra Hennida, 'Upaya Tata Kelola Lingkungan Di Tiongkok: Hambatan-Hambatannya', *Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga*, 2014, 290.

<sup>6</sup> Md. Nazirul Islam Sarker and others, 'Low Carbon City Development in Tiongkok in the Context of New Type of Urbanization', *Low Carbon Economy*, 09.01 (2018), 45. <<https://doi.org/10.4236/lce.2018.91004>>.

<sup>7</sup> A Gromico, S Indriastuti, and L D Erianti, 'Ancaman Polusi Lingkungan China Terhadap Human Security Di Jepang (China's Pollution Threat to Human Security in Japan)', *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 1 (2013), 5.

berkelanjutan dengan menekankan pada penggunaan inovasi dan perkembangan teknologi dalam pembangunan.<sup>8</sup>

Masalah pencemaran lingkungan, perubahan iklim, dan kelangkaan sumber daya telah menunjukkan bahwa sangat penting untuk dilaksanakannya pembangunan dengan konsep *Green City*. *Green City* adalah konsep yang ditawarkan dalam pengupayaan perbaikan kerusakan lingkungan di Tiongkok. Terdapat 3 konsep dalam pengembangan *Green City* sendiri, yaitu pengembangan kota ramah lingkungan (*eco-city*), kota rendah karbon (*low-carbon city*), dan kota ramah lingkungan rendah karbon (*lowcarbon ecocity*) atau gabungan dari kedua konsep tersebut.

Mengapa sangat penting dilakukannya pembangunan dengan konsep *Green City*, dikarenakan konsep *Green City* ini sangat erat kaitannya dengan *sustainable development* yaitu antara membangun kota ramah lingkungan dan menjaga pertumbuhan ekonomi secara bersamaan. Perubahan iklim dan tekanan populasi yang tinggi membuat urgensi pembangunan *Green City* harus dilakukan dengan perencanaan yang lebih progresif dan cepat yang menyesuaikan laju pembangunan saat ini. Permasalahan pembangunan adalah permasalahan kompleks yang tidak bisa ditangani secara umum, tetapi harus secara menyeluruh melalui perencanaan yang matang dengan visi yang menjawab solusi ke depan untuk menjawab tantangan kerusakan lingkungan. Jika tidak dilakukan pembangunan dengan konsep *Green City*, maka dapat dipastikan kota-kota di Tiongkok akan lebih tercemar, terlebih lagi *Green City* ini adalah sebuah bentuk komitmen Tiongkok akibat kerusakan lingkungan yang terjadi.

## TINJAUAN PUSTAKA

Tulisan ini menggunakan lima referensi sebagai bahan pendukung rampungnya penelitian dalam tulisan ini, **Pertama**, penelitian karya Dorin Gusman dan Joko Waluyo yang berjudul Peran *Greenpeace* dalam Penanganan Kerusakan Lingkungan (Polusi Udara dan Air) di China, Vol. 6, No. 2, Tahun 2015, Jurnal Transnasional, yang menjelaskan tentang bagaimana isu pencemaran lingkungan Tiongkok, yang muncul ketika pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi di Tiongkok menunjukkan kemajuan yang luar biasa.<sup>9</sup> *Greenpeace* telah melakukan berbagai kegiatan yakni, melakukan kampanye terhadap masalah pencemaran udara dan air, advokasi bersama masyarakat menekan kebijakan pemerintah Tiongkok dalam hal lingkungan.

Tulisan ini mempunyai kesamaan terhadap penelitian penulis yakni, sama-sama membahas mengenai kerusakan lingkungan di Tiongkok. Walaupun terdapat beberapa persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian Gusman, namun penelitian yang dilakukan Gusman berfokus pada *Greenpeace* sebagai NGO yakni salah satu Organisasi Lingkungan hidup yang memiliki *Bargaining Power* yang membantu Tiongkok dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan yang terjadi sedangkan penelitian penulis berfokus pada komitmen Tiongkok dalam mewujudkan visi *Green miracle* melalui pembangunan *Green City*.

---

<sup>8</sup> Sarker and others.

<sup>9</sup> Gusman and Joko Waluyo.

**Kedua,** Penelitian oleh Hidayat Chusnul Chotimah yang berjudul Analisis Strategi Keamanan Energi Cina dalam Upaya Penurunan Emisi Karbon Melalui Pendekatan Konstruktivisme, Vol. 19, No. 1, Tahun 2017 dalam Jurnal Politik Internasional. Jurnal tersebut menjelaskan tentang berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Tiongkok dalam menjalankan strategi keamanan energinya dalam rangka mewujudkan penurunan emisi karbon. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwasanya tindakan yang diambil oleh pemerintah Tiongkok merupakan tindakan yang dilakukan karena adanya tekanan dari negara luar untuk melakukan komitmen perubahan iklim.<sup>10</sup>

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yakni sama-sama membahas upaya Tiongkok dalam mengatasi masalah lingkungan terutama dalam hal keamanan energi, hanya saja penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, berfokus pada fase apa saja yang dilalui Tiongkok dalam mencapai penurunan emisi gas karbon, mulai dari Sosialisasi dan Internalisasi *Climate Change Regime* oleh Pemerintah Tiongkok, seperti pada fase pertama disebut sebagai *energy self-sufficiency* dengan berfokus pada *internal supply* yang dimulai pada tahun 1949-1993; fase kedua ditandai oleh *supply-oriented energy security* dan *going abroad strategy* yang dimulai dari tahun 1993-2003. Sementara itu fase ketiga terdiri atas dua periode pada tahun 2003-2010.<sup>11</sup>

**Ketiga.** Penelitian yang berjudul Ancaman Polusi Lingkungan China Terhadap *Human security* di Jepang oleh Andrey Gromico dan kawan-kawan, Vol. 1, No. 1, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa ini menjelaskan bagaimana pencemaran air dan udara di Tiongkok yang sampai ke wilayah yuridiksi Jepang, hal tersebut memberi ancaman terhadap keamanan lingkungan Jepang. Ancaman tersebut dikarenakan oleh industrilisasi berat dan kondisi geografi Tiongkok yang berdekatan dengan Jepang.

Walaupun terdapat persamaan pada segi pembahasan isu polusi lingkungan di Tiongkok, penelitian milik Andrey Gromico dan kawan-kawan tetap berbeda dengan penelitian penulis. Perbedaan dapat dilihat dari segi fokus penelitian, Andrey Gromico dan kawan-kawan lebih berfokus pada ancaman yang ditimbulkan oleh polusi lingkungan Tiongkok, sedangkan penulis lebih berfokus kepada strategi Tiongkok dalam mewujudkan visi *Green miracle* melalui pembangunan *Green City*.

**Keempat,** penelitian yang berjudul Efektivitas *Tripartite Environment Ministers Meeting* (TEMM) Terhadap Penanggulangan Masalah Lingkungan di Tiongkok, Jepang Dan Korea Selatan, *Journal of International Affairs*, Vol. 1, No. 1 tahun 2021, oleh Adriansyah Wijaya dan kawan-kawan yang membahas tentang Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan membentuk kerjasama di bidang lingkungan demi menjaga keberlangsungan dan pelestarian lingkungan air dan udara yang dimiliki oleh ketiga negara industri tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Chotimah.

<sup>11</sup> Chotimah.

<sup>12</sup> Adriansyah; Darwis; Abdullah Wijaya Husein, 'Efektivitas Tripartite Environment Ministers Meeting (TEMM) Terhadap Penanggulangan Masalah Lingkungan Di Tiongkok, Jepang Dan Korea Selatan', *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 1.1 (2021), 74–100 <<https://journal.unhas.ac.id/index.php/hujia/article/view/12723/6425>>.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yakni membahas bagaimana strategi Tiongkok dalam menyelesaikan masalah lingkungan, termasuk dengan bergabung ke dalam *Tripartite Environment Ministers Meeting* (TEMM), yang diharapkan mampu memberikan solusi terhadap kerusakan lingkungan yang memerlukan kerjasama dengan negara lain. Kerjasama dilakukan untuk saling menutupi kekurangan ataupun memenuhi kepentingan nasionalnya.<sup>13</sup> Namun penelitian ini tetap berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, penelitian tersebut berfokus pada strategi Tiongkok dalam menyelesaikan masalah lingkungan dengan bergabung ke dalam TEMM, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah strategi Tiongkok dalam menyelesaikan masalah lingkungan melalui strategi *Green city*.

**Kelima**, penelitian milik Diva S Rakasiwi dalam Jurnal Hubungan Internasional Vol. 1, No. 1 tahun 2014, yang berjudul Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Kebijakan Perlindungan Lingkungan di Tiongkok yang menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Tiongkok, sebagai negara yang memulai peduli terhadap perlindungan lingkungan dalam mengimplementasikan strategi perlindungan lingkungannya. Tiongkok melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan mencegah kondisi lingkungan agar tidak semakin memburuk, antara lain, dengan adanya birokrasi khusus yang bertugas menegakkan kebijakan perlindungan lingkungan dan juga adanya organisasi non-pemerintah yang berfungsi sebagai pengawas dalam implementasi suatu kebijakan.<sup>14</sup>

Walaupun terdapat banyak kesamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis, namun penelitian tersebut memiliki perbedaan yakni pada bagian strategi, dimana penelitian milik Diva tersebut berfokus pada strategi Tiongkok dengan menggunakan *Five Years Plan* dalam mengatasi permasalahan lingkungannya, sedangkan penelitian penulis berfokus pada Tiongkok dengan strategi *Green city* sebagai visi terbaru dalam menyelesaikan masalah lingkungan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang akan menguraikan bagaimana strategi Tiongkok dalam mewujudkan visi *Green Miracle* melalui pembangunan *Green City*. Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif, dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk literatur dan internet. Penelitian kualitatif berkaitan dengan konstruksi dan pemahaman realitas. Penelitian ini akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana strategi Tiongkok dalam mewujudkan visi *Green Miracle* melalui pembangunan *Green City*.

Penulisan penelitian ini menggunakan tingkat analisis negara (*state-level analysis*), pada level analisis ini, penjelasan tentang perilaku negara ditentukan oleh faktor-faktor internal dari negara tersebut.<sup>15</sup> Menurut Rourke, yang diperlukan ketika seorang peneliti

---

<sup>13</sup> Wijaya Husein.

<sup>14</sup> Diva Rakasiwi, 'Faktor - Faktor Yang Menghambat Kebijakan Perlindungan Lingkungan Di China', *Jurnal Hubungan Internasional*, 2015 <<https://repository.unair.ac.id/17611/1/1>. HALAMAN JUDUL.pdf>.

<sup>15</sup> Yessi Olivia, 'Level Analisis Sistem Dan Teori Hubungan Internasional', *Jurnal Transnasional*, 5.1 (2013), 896.

menggunakan level analisis negara adalah pemahaman tentang bagaimana berbagai aktor (birokrat, kelompok kepentingan dan badan legislatif) di dalam negara berperan dalam pengambilan kebijakan luar negeri.<sup>16</sup> Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu mengacu pada data-data yang diperoleh dari orang-orang yang tidak hadir di tempat kejadian, tetapi mereka menerima informasi dengan mewawancarai saksi atau dengan membaca dokumen primer.<sup>17</sup> Teknik pengumpulan data Penulisan penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dalam mengumpulkan data. Melalui metode ini, data-data yang dikumpulkan dapat berupa buku, serta sumber-sumber artikel dari internet yang berkaitan dengan strategi Tiongkok dalam mewujudkan visi *Green Miracle* melalui pembangunan *Green City*.<sup>18</sup>

## KERANGKA PEMIKIRAN

### GREEN THEORY (TEORI HIJAU)

Isu-isu lingkungan menimbulkan tantangan besar terutama yang berkaitan dengan peran dan pentingnya sebuah negara dan gagasan kedaulatan yang ada di dalamnya, lalu hubungan antara lingkungan internasional dan domestik dari kegiatan politik, serta hubungan antara pengetahuan, nilai-nilai, kekuatan, dan kepentingan dalam menentukan hasil dalam proses internasional. Permasalahan-permasalahan tentang lingkungan ini, kemudian memunculkan perdebatan diantara kelompok-kelompok masyarakat tertentu, yang kemudian dari perdebatan-perdebatan ini muncul suatu teori untuk menjelaskan isu tentang lingkungan itu sendiri. Teori yang muncul dalam studi Hubungan Internasional sebagai akibat dari adanya isu lingkungan ini yaitu Teori Hijau atau *Green Theory*.<sup>19</sup> Mengawali tahun 1960-an, telah muncul banyak kekhawatiran mengenai polusi dan pelestarian lingkungan alam di dunia Internasional, kekhawatiran tersebut terutama muncul di negara yang telah maju.<sup>20</sup>

Sama halnya dengan teori-teori lain yang berkembang di dalam studi Hubungan Internasional, Teori Hijau juga memiliki beberapa asumsi dasar. Teori Hijau memiliki setidaknya tiga asumsi dasar yang menjadi dasar terbentuknya pemikiran-pemikiran dalam Teori Hijau yang pertama yaitu, Teori Hijau lebih menekankan dari sisi global daripada sisi internasional. Sebagai contohnya yaitu, masyarakat global serta hak-hak masyarakat lokal untuk mengontrol sumber daya dan keberadaan masyarakat bio-regional sebagai dasar pembangunan di bumi penting untuk diakui. Asumsi yang kedua yaitu, pemikiran-pemikiran hijau mulai berkembang dari pemahaman implisit bahwa praktik manusia saat ini dianggap tidak sinkron dengan dunia yang bukan merupakan dunia manusia. Kemudian asumsi yang ketiga yaitu pemikiran-pemikiran dari Teori Hijau menekankan bahwa praktik modern yang didukung oleh sistem

---

<<https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/1796>>.

<sup>16</sup> Olivia.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, ed. by Sutopo, ALFABETA, 2nd edn (Bandung: ALFABETA, 2019).

<sup>18</sup> Sugiyono.

<sup>19</sup> John Baylis and Steve Smith, *The Globalization of World Politics 2nd Edition*, 2001. 351.

<sup>20</sup> Baylis and Smith.

kepercayaan filosofis dari antroposentris telah menyebabkan permasalahan-permasalahan atau krisis lingkungan.<sup>21</sup>

Teori hijau bertujuan untuk mempelajari bagaimana negara dan sistemnya harus lebih berfungsi dalam menanggapi masalah ekologi, karena masalah ekologi dapat mengancam keamanan negara. Salah satu contoh, kelangkaan sumber daya alam terbarukan (terutama air) adalah degradasi lingkungan dan meningkatnya penggusuran lingkungan yang dapat meningkatkan kemungkinan konflik dan kekerasan antar negara.<sup>22</sup>

Penulis akan mencoba menggunakan Teori Hijau untuk menganalisis Strategi Tiongkok dalam mewujudkan visi *Green miracle* melalui pembangunan *Green City*. Pertama, penulis akan menyoroti polusi lingkungan yang terus meningkat setiap tahunnya dikarenakan penggunaan energi yang berlebihan demi menghidupkan ekonomi negaranya. Kedua, penulis akan membahas bagaimana Tiongkok dalam penurunan emisi karbon berdasarkan komitmen bebas karbon di tahun 2030. Ketiga, penulis akan membahas bagaimana Tiongkok mewujudkan visi *Green miracle* melalui *Green City* sebagai bentuk penyelesaian masalah polusi lingkungan di Tiongkok.

Menurut Teori Hijau, bahwa awal mula terjadinya kerusakan lingkungan adalah industrialisasi yang sangat berkaitan dengan keadaan meningkatnya polusi di Tiongkok akibat industrialisasi. Teori Hijau juga menyatakan bahwa keamanan negara akan terancam akibat masalah lingkungan yang tidak segera diatasi dan pemerintah harus responsif terhadap masalah lingkungan.<sup>23</sup> Permasalahan tersebut dapat dikaitkan dengan keseriusan Tiongkok mengatasi masalah kerusakan lingkungan di negaranya dengan memberikan komitmen serius terhadap perwujudan visi *Green miracle* melalui pembangunan *Green City*.

## DEKARBONISASI

Perjanjian Paris 2015 membuat istilah dekarbonisasi dikenal luas. Dekarbonisasi adalah proses menghilangkan atau mengurangi emisi karbon antropogenik untuk mencapai nol emisi. *Net Zero Emission* (NZE) adalah keseimbangan antara emisi dan pembuangan sehingga tidak ada gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer.<sup>24</sup> Program tersebut berupa mitigasi krisis iklim, yakni mengurangi produksi emisi gas rumah kaca untuk mencegah pemanasan global 1,5°C pada 2030 dan 2°C pada 2050. Dekarbonisasi membutuhkan transisi energi, perubahan struktural yang menghilangkan karbon dari produksi energi, ini adalah elektrifikasi ekonomi berdasarkan energi alternatif yang bersih, yang hanya memancarkan energi yang dapat diserap bumi.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Llyod Pettiford Jill Steans, 'Introduction to International Relations', *The American Catholic Sociological Review*, 15.3 (2005), 279 <<https://doi.org/10.2307/3708196>>.

<sup>22</sup> Jill Steans.

<sup>23</sup> Matthew Paterson, 'Green Politics', *Green History*, 2010, 227–38 <[https://doi.org/10.4324/9780203410134\\_chapter\\_18](https://doi.org/10.4324/9780203410134_chapter_18)>.

<sup>24</sup> Pramono Dwi Susetyo, 'Bisakah Mencapai Target Dekarbonisasi?', 2022 <<https://www.forestdigest.com/detail/2068/dekarbonisasi>> [accessed 17 January 2023].

<sup>25</sup> Pramono Dwi Susetyo.



Dekarbonisasi merupakan langkah penting dalam perang melawan perubahan iklim, karena mengurangi emisi CO<sub>2</sub> sangat penting untuk mencegah pemanasan global. Program dekarbonisasi membantu mengurangi emisi karbon dengan menerapkan energi terbarukan, efisiensi energi, dan prakarsa lingkungan lainnya. Aktivitas manusia telah melepaskan karbon ke atmosfer selama beberapa dekade. Penyebab utama masalah ini dikarenakan penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan, ini menyebabkan pemanasan global dan berkontribusi pada perubahan iklim yang sangat berbahaya bagi manusia.<sup>26</sup>

Program tersebut dapat dicapai dengan mengembangkan sumber energi baru atau meningkatkan efisiensi sumber energi yang ada. Intensitas karbon adalah jumlah karbon dioksida yang dipancarkan per unit energi yang dikonsumsi. Ketika intensitas CO<sub>2</sub> berkurang, emisi karbon dioksida berkurang. Mengurangi emisi karbon dioksida dari jaringan berarti menggunakan lebih banyak sumber energi terbarukan dan lebih sedikit bahan bakar fosil. Pengurangan intensitas karbon berarti, lebih banyak energi yang dikonsumsi dan lebih sedikit emisi yang dihasilkan.

Penjelasan mengenai Strategi Tiongkok dalam Mewujudkan Visi *Green miracle* melalui pembangunan *Green City* dianalisis dengan konsep dekarbonisasi, dimana dekarbonisasi sendiri adalah sebagai salah satu konsep penting dalam perwujudan pembangunan *Green City*. Tiongkok dalam mencapai target dekarbonisasi, tentunya bukan jalan yang mudah, dikarenakan Tiongkok masih mengandalkan batu bara sebagai bahan bakar utama yang paling berperan untuk setengah dari energi Tiongkok, meski begitu, Tiongkok tampaknya tetap berkomitmen untuk mencapai *net zero* dalam 40 tahun kedepan. Menurut perkiraan Badan Energi Internasional, pada tahun 2060, sekitar 74% dari konsumsi energi primer Tiongkok harus berasal dari angin, matahari, air, atau energi terbarukan lainnya. Kemajuan di bidang ini sudah mencapai kemajuan, pada tahun 2021 Tiongkok mewakili sekitar sepertiga instalasi angin dan matahari secara global, ini berarti pasar domestik Tiongkok memiliki rantai pasokan yang matang. Konsep dekarbonisasi ini diharapkan bisa membantu Tiongkok dalam mengatasi konsumsi penggunaan energinya yang sangat tinggi.<sup>27</sup>

## KERJASAMA INTERNASIONAL

Kerjasama internasional muncul karena keadaan, kebutuhan, kemampuan serta potensi dari suatu negara yang berbeda-beda. Hal tersebut mengharuskan suatu negara untuk bekerjasama dengan negara lainnya agar dapat memenuhi kepentingan nasionalnya di luar negeri. Kerjasama internasional dapat terjadi jika suatu negara setidaknya memiliki dua persyaratan utama, yaitu adanya keharusan menghargai kepentingan masing-masing negara

---

<sup>26</sup> Virginie and Shannon Zheng Maisonneuve, 'How China Can Achieve Its Ambitious Decarbonisation Plan', *Allianz Global Investors* (Beijing, 2022), p. 3 <<https://www.allianzgi.com/en/insights/outlook-and-commentary/ambitious-decarbonisation-plan>>.

<sup>27</sup> Virginie and Shannon Zheng Maisonneuve, 'How China Can Achieve Its Ambitious Decarbonisation Plan', *Allianz Global Investors* (Beijing, 2022) <<https://www.allianzgi.com/en/insights/outlook-and-commentary/ambitious-decarbonisation-plan>>. [accessed 18 January 2023]

yang terlibat bekerjasama serta adanya keputusan bersama Negara-negara yang melakukan kerjasama dalam mengatasi setiap persoalan yang timbul dalam perjanjian tersebut.<sup>28</sup>

Menurut pendapat James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff kerjasama atau *cooperation* dapat muncul dari kesepakatan masing-masing individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai akibat persepsi kepentingan sendiri. Inti dari perilaku yang mengarah pada kerjasama terletak pada kepercayaan masing-masing pihak (masing-masing negara) bahwa pihak lain juga akan melakukan kerjasama, dimana masalah utama yang muncul dari perilaku ini adalah kepentingan nasional masing-masing negara.<sup>29</sup> Bila mengarah pada persamaan kepentingan nasional maka kerjasama yang diinginkan akan tercapai.

Kerjasama tersebut juga didukung dengan adanya pendapat yang bersumber pada pelaksanaan politik luar negeri yang menjelaskan bahwa baik persoalan maupun sasaran tertentu tidak akan tercapai hanya dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kerjasama akan terjadi apabila manfaat yang didapat diharapkan lebih besar daripada akibat-akibat yang harus ditanggung oleh suatu negara. Oleh karenanya keberhasilan kerjasama dapat diukur dengan membandingkan besarnya manfaat yang diraih dari konsekuensi yang ditanggung. Dalam kajian hubungan internasional setidaknya ada 3 bentuk kerjasama yang diketahui yakni kerjasama regional, kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ***Grand Design* Kebijakan Lingkungan Tiongkok**

Permasalahan lingkungan menjadi isu strategis yang dihadapi Tiongkok sejak reformasi ekonomi dilakukan dekade 80-an, berbagai upaya strategis diambil demi menanggulangi permasalahan ini, berbagai kebijakan diterapkan, dan kerangka kerjasama global diadopsi. Salah satunya adalah dengan membangun dan mengubah paradigma pembangunan melalui Visi *Green Miracle* atau kemudian dikenal juga dengan *Xi's Vision of Ecological Civilization*. Melalui visi yang dikemukakan pada April 2022 ini Presiden Xi Jinping menunjukkan komitmennya dalam mengedepankan pembangunan hijau, dan memastikan terbangunnya harmoni antara manusia dan alam.<sup>30</sup> Melalui visi ini, Tiongkok berusaha mentransformasikan paradigma pembangunan, model pembangunan bisnis, pemahaman masyarakat akan hidup bahagia, dan juga pola konsumsi masyarakat yang mensejahterakan. Oleh karena itu masyarakat akan mendapatkan pemahaman akan gaya hidup menjaga lingkungan, dan belajar untuk menerapkan pola hidup hijau dan rendah karbon.

Sekitar kurun waktu 2012-2021, Tiongkok telah menghijaukan 64 juta hektar lahan dengan menanam pohon, mengambil alih kontrol 18.53 juta hektar lahan sebagai upaya preventif serta mengembalikan kesuburan tanah pada wilayah seluas 800.000 hektar. Penggunaan energi terbarukan meningkat dari 14.5% di tahun 2012 menjadi 25.5% di akhir

---

<sup>28</sup> Gunawan Yordan, 'Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Asap Lintas Batas Negara Pasca Ratifikasi Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution', *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* (Universitas muhammadiyah Yogyakarta, 2017),16.

<sup>29</sup> Yordan.

<sup>30</sup> Zhangrui, 'China's "green Miracles" Highlight Xi's Vision of Ecological Civilization', *Xinhua*, 2022.

tahun 2021, dengan menurunkan penggunaan batu bara sebesar 12%. Sektor industri hijau Tiongkok juga meningkat serta secara aktif ikut serta dalam kerangka global menanggulangi kerusakan lingkungan. Secara terus-menerus mengimplementasikan butir-butir Perjanjian Paris, aktif dalam kerjasama selatan-selatan (*south-south cooperation*) mempromosikan pembangunan berkelanjutan melalui skema *Belt and Road Initiative* (BRI).<sup>31</sup> Model pembangunan yang ditawarkan Tiongkok berdasarkan pada berbagai kebijakan-kebijakan lingkungan Tiongkok sejak dekade 70-an yaitu pembangunan dengan menekankan keseimbangan.

## Dinamika Kebijakan Lingkungan Tiongkok

Proses pengimplementasian kebijakan lingkungan di Tiongkok pada dasarnya dibagi dalam beberapa tahap yang sifatnya berkelanjutan sejak tahun 1970an. Pada tahun 1975 Tiongkok memperkenalkan *Five-Year Environmental Protection Plan* yang kelima untuk pertama kali, kebijakan lima tahunan ini fokus untuk mengontrol industri pertambangan khususnya dalam mengurangi polusi akibat dari operasionalnya-mendorong limbah akibat dari industri ini dikendalikan sesuai dengan standar nasional Tiongkok.<sup>32</sup>

Kemudian pada periode 1981-1985, kebijakan lingkungan perlima tahun yang keenam dirilis dengan tema *Five-Year Plan for National Economic and Social Development*. Kebijakan ini dibuat untuk tujuan yang sangat spesifik yaitu untuk mengukur dan menanggulangi peningkatan polusi, meningkatkan kapasitas pengolahan limbah industri, penguatan perencanaan proteksi lingkungan, pengawasan lingkungan, riset lingkungan dan pembuatan kebijakan lingkungan serta penegakan hukum terkait dengan pengerusakan lingkungan.<sup>33</sup> Secara konsisten Tiongkok memperbaharui kebijakan tata lingkungannya perlima tahunan hingga dikeluarkannya kebijakan ke-13 yaitu *Five-Year Ecological and Environment Protection Plan* (2016-2020).

Kebijakan lingkungan Tiongkok diimplementasikan melalui pendekatan legal dan penguatan kesadaran masyarakat akan lingkungan. Merujuk pada *grand design* pembangunan lingkungan di Tiongkok, setidaknya terdapat empat tahapan penting dalam membangun ini.<sup>34</sup> Pertama, membangun Kesadaran Lingkungan (*Building Environmental Awareness*) program ini dimulai sejak tahun 1973-1978 melalui kampanye sistematis pemerintah. Kedua, mengadopsi pendekatan yang berorientasi pada masalah (*Adoption of a problem-oriented approach*) dimulai sejak tahun 1979-1988, pelibatan akademisi dalam memetakan permasalahan terkait dengan lingkungan. Ketiga, meningkatkan kembali tata kelola masalah lingkungan (*scaling up environmental governance*) dan terakhir mempromosikan perlindungan lingkungan secara sistematis (*systematically promoting environmental protection*) mulai digalakkan sejak tahun 2013 hingga saat ini.

---

<sup>31</sup> Huaxia, 'China Focus: China Issues White Paper on Green Development', *Xinhua*, 2023.

<sup>32</sup> Jun Wan, 'Environmental Planning in China (1949-Present)', in *Beautiful China: 70 Years Since 1949 and 70 People's Views on Eco-Civilization Construction* (Singapore: China Environment Publishing Group, Co., Ltd, 2021), pp. 509–16 <[https://doi.org/10.1007/978-981-33-6742-5\\_50](https://doi.org/10.1007/978-981-33-6742-5_50)>.

<sup>33</sup> Jun Wan.

<sup>34</sup> Jun Wan.

## Pembangunan *Green City* di Tiongkok

Kota hijau (*Green City*) atau disebut juga dengan kota ramah lingkungan adalah desain perkotaan dengan memprioritaskan pelestarian alam di samping kesejahteraan ekonomi, sosial dan fisik dari penduduk kota. *Green City* mengambil pandangan jangka panjang dengan meminimalkan kerusakan ekologi lokal dan menciptakan tempat berlindung yang nyaman untuk generasi yang akan datang. Kota Hijau dalam menghadapi perubahan iklim diharapkan mampu beradaptasi dengan iklim yang berubah-ubah dan tahan terhadap cuaca ekstrem.

Tiongkok telah memilih untuk mbingkai konsep kota ramah lingkungan melalui cita-cita pembangunan *Green City*. Konsep ini menekankan sebuah budaya lingkungan yang menyerukan pembangunan dunia manusia dan alam yang harmonis dengan ditandai dengan perdamaian berkelanjutan dan kemakmuran bersama. Konsep ini didefinisikan secara luas tentang saling menghormati sesama manusia, alam, dan masyarakat pada tataran material dan spiritual. Manusia berada di pusat sistem eko-budaya tetapi tidak mendominasi alam. Konstitusi yang diamandemen menekankan keseimbangan pembangunan perkotaan hijau yang ramah lingkungan dan hemat energi dan mengembangkan negara yang inovatif dengan masyarakat yang melestarikan sumber daya alam secara efisien.<sup>35</sup>

Tiongkok sendiri, mempromosikan pembangunan kota hijau menjadi bagian dari langkah inti untuk menghadirkan peradaban ramah lingkungan di Tiongkok, dan praktik Tiongkok dalam hal ini dapat memberikan referensi yang berwawasan untuk transformasi berkelanjutan kota-kota di negara lain. Berdasarkan beberapa analisis, kinerja keseluruhan kota-kota di Tiongkok tidak terlalu tinggi dan menunjukkan ketidakseimbangan regional yang jelas. Kota-kota yang relatif kecil patut mendapat perhatian lebih pada saat ini. Akhirnya, peningkatan kualitas pembangunan ekonomi, stimulasi inovasi sosial, perbaikan infrastruktur perkotaan, dan kepadatan perkotaan yang sesuai diusulkan sebagai saran kebijakan untuk memfasilitasi transisi kota hijau.<sup>36</sup>

Adapun tindakan Tiongkok selanjutnya yakni membangun strategi yang sesuai dan relevan dengan konsep kebijakan luar negerinya yaitu perumusan pembangunan dengan konsep *Green City*. Inisiatif Tiongkok dalam perumusan ini bertujuan untuk pengurangan penggunaan energi di industri dan bangunan melalui; (1) renovasi pembangkit listrik tenaga batubara (2) gabungan panas dan proyek pembangkit listrik, (3) menggunakan limbah panas, (4) minyak konservasi, (5) meningkatkan efisiensi di mesin (6) mengoptimalkan sistem energi (7) efisiensi energi di gedung-gedung, (8) pencahayaan yang lebih efisien, (9) penghasilan produk pemerintah yang lebih hemat energi dan (10) sistem monitoring dan evaluasi. Tiongkok sendiri sadar akan pentingnya kebijakan energi untuk menciptakan perekonomian dan pembangunan yang tetap stabil. Selain itu, Tiongkok membuat kebijakan *China's National*

---

<sup>35</sup> Michael and Florian Steinberg Lindfield, *Green Cities*, ed. by Michael Lindfield and Florian Steinberg, 1st edn (Mandaluyong City: Asian Development Bank, 2012).

<sup>36</sup> Wei Huang and others, 'Evaluating Green City Development in China Using an Integrated Analytical Toolbox', *Journal of Cleaner Production*, 400 (2023), 136703 <<https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2023.136703>>.

*Climate Change Programe* yang berorientasi untuk mengurangi jumlah emisi gas dalam negerinya dan juga sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan iklim.<sup>37</sup>

Pembangunan dengan konsep *Green City* ini sangat berhubungan dengan keputusan terkait target netralitas karbon oleh Tiongkok yang menandai titik baliknya pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, visi kebijakan netral karbon yang menyerukan transformasi jangka panjang yang mendalam oleh Tiongkok dalam memproduksi dan menggunakan energi, dimana hal tersebut akan mempengaruhi setiap aspek ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Visi tersebut akan menjadi kenyataan di masa depan dan penting untuk menghindari konsekuensi terburuk dari perubahan iklim di seluruh dunia.<sup>38</sup>

Pemerintah Tiongkok melihat target netralitas karbon sebagai agenda untuk mengubah model pembangunan negara menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan untuk melindungi lingkungan dan kesehatan penduduk, baik di Tiongkok maupun secara global. Pemerintah telah menetapkan tujuan yang pada dasarnya dilakukan untuk mewujudkan modernisasi sosialis pada tahun 2035 disamping visi netralitas karbon. Tujuannya meliputi: meningkatkan kekuatan ekonomi, teknologi, dan inovasi Tiongkok secara signifikan; menaikkan PDB per kapita ke tingkat negara-negara sedang berkembang; modernisasi sistem pemerintahan; memajukan budaya dan kesehatan; dan mengurangi kesenjangan perkotaan-pedesaan dan regional. Tujuan modernisasi juga termasuk memajukan praktik kerja dan gaya hidup yang ramah lingkungan, dan perbaikan mendasar dalam lingkungan dengan tujuan membangun Tiongkok yang indah pada tahun 2050.<sup>39</sup>

### **Kota Liuzhou Sebagai Kota Hijau Pertama di Dunia**

Sebagai percontohan, Tiongkok membangun Kota hijau sekaligus menjadi yang pertama di dunia, kota Liuzhou yang terletak di Provinsi Guanxi, Tiongkok ini diciptakan untuk melawan polusi. Pembangunan ini dirancang oleh Stefano Boeri Architeti, sebuah tim yang mengembangkan proyek hijau di seluruh dunia, *Green City* yang futuristik akan menjadi rumah bagi komunitas yang terdiri dari sekitar 30.000 orang. Ini akan ditutupi tanaman hijau, termasuk hampir 1 juta tanaman lebih dari 100 spesies dan 40.000 pohon yang bersama-sama menyerap hampir 10.000 ton karbon dioksida dan 57 ton polutan, dan menghasilkan sekitar 900 ton oksigen setiap tahunnya. Hasilnya, *Green City* mampu membantu menurunkan suhu udara rata-rata, meningkatkan kualitas udara setempat, menciptakan penghalang kebisingan, menghasilkan habitat, dan meningkatkan keanekaragaman hayati lokal di wilayah tersebut.<sup>40</sup>

Kebijakan pembangunan di kota Liuzhou ini sebagai contoh dimana Tiongkok dengan komitmennya mendorong pengembangan dan penerapan bangunan ultra rendah energi dan

---

<sup>37</sup> Ruth Marlin Grace Sidabutar, 'Tekanan Internasional Dan Respon Kebijakan Luar Negeri: China's Peaceful Development Dalam Isu Lingkungan Global Dan Pembangunan Ekonomi Negara', *Social and Politic Science*, 1 (2020), 3.

<sup>38</sup> *An Energy Sector Roadmap to Carbon Neutrality in China, An Energy Sector Roadmap to Carbon Neutrality in China*, 2021, 67 <<https://doi.org/10.1787/5f517ddb-en>>.

<sup>39</sup> *An Energy Sect. Roadmap to Carbon Neutrality China*.

<sup>40</sup> Karla Lant, 'China Has Officially Started Construction on the World's First "Forest City"', *Futurism*, 2017, p. 1 <<https://futurism.com/china-has-officially-started-construction-on-the-worlds-first-forest-city>> [accessed 20 June 2023].

rendah karbon. Standar dan kode energi bangunan yang digunakan kini lebih ketat untuk meningkatkan desain bangunan dan kinerja teknologi hijau, hal ini membuat kota-kota yang akan dibangun nantinya dapat beralih ke bahan bakar rendah karbon. Proses pembangunan kota hijau di Tiongkok tentunya membutuhkan material bangunan siap pakai dan nol karbon, yang sangat hemat energi dan hemat sumber daya, baik menggunakan energi terbarukan secara langsung atau direncanakan untuk mengandalkan nol karbon pada tahun 2060. Tiongkok dalam mencapai netral karbon berusaha menurunkan kebutuhan energi pada gedung yang dibangun dengan cara membantu mengurangi permintaan pemanasan dan pendinginan secara keseluruhan.

Selain itu, untuk membantu kesuksesan dalam pembangunan kota hijau ini, Tiongkok membuat kebijakan untuk mengurangi bahkan menutup beberapa pabrik dan industri kotor di negaranya, demi tercapainya kota hijau yang ramah lingkungan. Tiongkok dengan nyata memindahkan beberapa industrinya ke negara berkembang di Asia dan di Afrika, seperti pabrik semen, baterai, dan mika. Tiongkok membangun pabrik tersebut di negara tempatnya membangun kerjasama luar negeri atau negara yang sudah diberi pinjaman luar negeri.

## **STRATEGI TIONGKOK DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN *GREEN CITY***

### **Kerjasama Tiongkok Melalui *Clean Development Mechanism (CDM)***

CDM adalah sebuah usulan mekanisme fleksibel Protokol Kyoto yang muncul ketika berlangsungnya pertemuan yang membahas Protokol Kyoto pada tanggal 11 Desember 1997. CDM pertama kali muncul diawali dengan proposal yang dibuat oleh delegasi dari negara Brazil. Proposal tersebut berhubungan dengan dana yang bisa dipergunakan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim oleh negara-negara berkembang. Dana tersebut dikenal *Clean Development Fund*, yang mana dana tersebut diperoleh dari denda dari Negara-negara Annex 1 yang tidak patuh dalam memenuhi komitmennya untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca. Besarnya dana yang dikeluarkan berdasarkan nilai tertentu per-ton emisi yang dihasilkan yang melebihi jatah yang seharusnya. Sehingga semakin seringnya terjadi kelebihan batas emisi, maka semakin besar juga dana yang dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi perubahan iklim.<sup>41</sup>

CDM bisa disebut sebagai sistem perdagangan penurunan emisi GRK antara negara maju dengan negara berkembang. Negara-negara maju tertarik untuk mengikuti mekanisme tersebut dikarenakan biaya proyek CDM lebih kompetitif dibanding biaya penurunan emisi yang harus dilakukan secara domestik maupun dengan negara Annex 1. Melalui proyek CDM negara maju akan memperoleh kredit penurunan emisi yang akan diterbitkan oleh badan pelaksana CDM pada tingkatan global setelah terverifikasi entitas operasional yang ditunjuk, sedang negara berkembang akan mendapatkan dana tambahan dari para investor untuk pengimplikasian proyek-proyek untuk mengurangi karbon dan GRK.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Moch Iqbal Tanjung, *Kerjasama Pemerintah Indonesia - Jepang Dalam Implementasi Mekanisme Protokol Kyoto* (Jakarta, 2013).

<sup>42</sup> Bunga Ayu Swastika, *Upaya Pemerintah China Dalam Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Melalui CDM (Clean Development Mechanism) Sebagai Bentuk Implementasi Protokol Kyoto*, 2017.3.

Aksi Tiongkok yang terlibat dalam lingkungan global dapat ditemui dari keterlibatan Tiongkok dalam mekanisme pengurangan emisi gas yang dihasilkan dari Protokol Kyoto, yaitu *Clean Development Mechanism* (CDM). Tiongkok telah menjadi salah satu negara yang paling aktif dan menarik untuk proyek-proyek CDM.<sup>43</sup> Saat ini, CDM berkonsentrasi pada perbaikan lingkungan ekologi, seperti meningkatkan penggunaan energi yang efektif, pengembangan energi daur ulang dan penghijauan skala besar.

Prioritas proyek CDM di Tiongkok adalah peningkatan efisiensi energi dan pengembangan serta pemanfaatan energi baru. Pemerintah asing dan perusahaan dari negara lainnya menunjukkan minat untuk mengembangkan proyek di Tiongkok sehingga memberi kesempatan bagi Tiongkok untuk mengurangi pertumbuhan emisinya melalui CDM. *China's Peaceful Development* yang diusung Tiongkok juga memberi ruang pada Tiongkok untuk berpartisipasi lebih aktif lagi dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Keputusan-keputusan Tiongkok kini menitikberatkan pada lingkungan dalam aspek ekonominya. Tiongkok juga membentuk departemen-departemen yang secara khusus terlibat dalam merumuskan posisi negosiasi Tiongkok terkait pembangunan ekonomi Tiongkok dan juga persoalan lingkungan.<sup>44</sup>

Selain itu, melalui mekanisme CDM ini Tiongkok dapat mengundang negara-negara maju untuk mengadakan investasi seperti adanya tambahan dana, dan juga dapat meningkatkan kerjasama internasional. Tiongkok juga nantinya akan mendapatkan keuntungan seperti adanya transfer teknologi yang dapat membantu Tiongkok untuk mempersiapkan diri menghadapi dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Walaupun dampak perubahan iklim bervariasi di seluruh dunia, namun Tiongkok merupakan kelompok negara yang mendapat dampak paling nyata dari perubahan iklim.<sup>45</sup>

Peran aktif Tiongkok dalam CDM yang membuat para investor mengadakan proyek-proyek di Tiongkok dan bagaimana Tiongkok melalui *China's Peaceful Development* membentuk suatu upaya diplomasi publik yang dapat menekan tekanan internasional dan bersama-sama dengan negara lain melakukan kerjasama dalam pengurangan dampak perubahan iklim.<sup>46</sup>

Selanjutnya, terkait proyek-proyek kerjasama CDM Tiongkok dengan negara lain, dapat dilihat dari kerjasama yang terjalin antara Tiongkok dan salah satu anggota Uni Eropa yakni negara Belanda. Proyek CDM Huitengxile *Wind Farm* merupakan proyek pertama yang dilakukan oleh Tiongkok melalui kerjasama dengan pemerintah Belanda berupa pembangkit listrik tenaga angin di wilayah Inner Mongola Tiongkok.<sup>47</sup> Tiongkok memiliki permasalahan utama

---

<sup>43</sup> Bunga Ayu Swastika, 'Upaya Pemerintah China Dalam Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Cdm ( Clean Development Mechanism ) Sebagai Bentuk Implementasi Protokol Kyoto ( Efforts of Chinese Government in Reduction of Greenhouse Gas', *UNEJ Journal*, 1.1 (2014), 1–14.

<sup>44</sup> Swastika, 'Upaya Pemerintah China Dalam Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Cdm ( Clean Development Mechanism ) Sebagai Bentuk Implementasi Protokol Kyoto ( Efforts of Chinese Government in Reduction of Greenhouse Gas'.

<sup>45</sup> Swastika, *Upaya Pemerintah China Dalam Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Melalui CDM (Clean Development Mechanism) Sebagai Bentuk Implementasi Protokol Kyoto*.

<sup>46</sup> Sidabutar.

<sup>47</sup> Nurul Azizah, 'Kebijakan Cina Terhadap Proyek Clean Development Mechanism Di Sektor Energi Terbarukan: Kasus Huitengxile Wind Farm' (Universitas Airlangga, 2016) <<http://lib.unair.ac.id>>.

yang sama pada efisiensi energi yang dapat diselesaikan melalui transfer teknologi dan *capacity building* yang dapat diselesaikan melalui penerima CDM di sektor efisiensi energi. Dalam operasionalnya dijelaskan dengan menggunakan konsep energi terbarukan, *soft energy path* dan pembangunan berkelanjutan.

Negara Tiongkok yang sangat rentan akan perubahan iklim dan dampaknya yang dapat mempengaruhi aktivitas ekonominya sebagai sektor pemasukan utama Tiongkok. Berdasarkan hal tersebut para pembuat keputusan Tiongkok akhirnya merumuskan kebijakan *China's Peaceful Development* sebagai gambaran bahwa Tiongkok turut bermain aktif dalam persoalan perubahan iklim global. Di samping itu, kebijakan luar negeri tersebut juga menjadi alat diplomasi publik Tiongkok dalam mempromosikan kepentingan nasional Tiongkok di kancah internasional. Tampak jelas bahwa pemerintah Tiongkok mulai menggunakan *soft power* dalam perumusan kebijakannya untuk mencapai kepentingan nasional negaranya.<sup>48</sup>

### **Kerjasama Internasional Tiongkok Dengan Negara Lain Untuk Kebutuhan Energi Dalam Negeri.**

Pembangunan yang terus menerus terjadi di Tiongkok mengharuskan Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Tiongkok tentu tidak bisa memenuhi hal tersebut sendiri, terlebih lagi saat ini sedang digiatkannya pembangunan dengan konsep *Green City*. Tiongkok dalam memenuhi kebutuhan energinya sangat bergantung dengan negara lain, oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Tiongkok membangun kerjasama dengan negara lain demi terpenuhi kebutuhan dalam negerinya.<sup>49</sup>

Tiongkok sendiri menutup beberapa perusahaan dan tambang di negaranya sebagai bentuk komitmennya untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan juga untuk memberikan citra yang baik di dunia internasional. Kemudian Tiongkok mengeluarkan kebijakan yakni memindahkan perusahaan yang tidak ramah lingkungan ke luar negaranya seperti pabrik semen, baterai dan sebagainya yang membawa banyak polusi. Selain itu, untuk menekan angka polusi udara, pemerintah Tiongkok berani menekan laju pertumbuhan ekonomi dengan memperketat pemberian izin usaha, bahkan berani menutup industri yang terbukti tidak ramah lingkungan.

Tiongkok membangun industri tidak ramah lingkungan tersebut di beberapa negara berkembang yang sebelumnya pernah diberi bantuan luar negeri, salah satu contohnya adalah Indonesia. Kerjasama bilateral dapat terlihat pada kegiatan kerjasama dalam membangun beberapa industri semen di Indonesia. Tiongkok menandatangani suatu perjanjian pendahuluan sebesar 2,35 miliar dollar guna membangun beberapa pabrik semennya di Indonesia.<sup>50</sup> Produk-produk semen tersebut nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dalam negeri Tiongkok dan juga akan dijual ke negara-negara tetangga. Perusahaan Tiongkok

---

<sup>48</sup> Sidabutar.

<sup>49</sup> Garcia Krisnando Nathanael, 'Kerjasama Luar Negeri Indonesia Dan China: Studi Kasus Ekspor Batubara', *Jurnal Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 3 (2020), 203–19 <<https://doi.org/10.33822/mjihi.v3i2.2320>>.

<sup>50</sup> Bhaskara Adhi, 'Ekspansi Proyek OBOR Cina, Indonesia Diminta Waspada Jebakan Utang', *Tirto ID*, 2019, p. 1 <<https://tirto.id/ekspansi-proyek-obor-cina-indonesia-diminta-waspada-jebakan-utang-dnpo>> [accessed 22 June 2023].



juga merencanakan membangun pusat pembangkit listrik tenaga batu bara guna memasok kelistrikan ke pabrik semen yang dibangun di sekitar Asia Tenggara.

Selain permasalahan tersebut, Tiongkok memiliki keterkaitan dengan Indonesia terkait ekspor batu bara. Tiongkok sendiri mengkonsumsi 55% jumlah batu bara setelah India, ini menjadikan terciptanya kerjasama yang lebih intim antara Tiongkok dan Indonesia. Selain itu, Kualitas batubara Indonesia yang termasuk kategori *Thermal Coal* sangat cocok digunakan untuk PLTU di Tiongkok, dengan demikian, permintaan batubara ke Indonesia akan terus mengalami peningkatan.<sup>51</sup>

Batubara telah menjadi sumber energi utama di Tiongkok. Dilihat dari perkembangan dan kinerjanya, jenis batubara di Tiongkok sendiri biasa-biasa saja, ditambah dengan pertambangan di Tiongkok sendiri tergolong sangat kecil dan sedikit jika dibandingkan dengan negara lain seperti Indonesia, hal ini membuat Tiongkok mau tidak mau harus mengimpor batubara dari negara lain untuk mencapai tujuan dan kebijakannya. Kebutuhan Tiongkok yang sangat besar akan batubara juga berdampak pada kondisi alam di Tiongkok sendiri.

Eksploitasi yang dilakukan oleh Tiongkok juga tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan terjadi di negara-negara Afrika. Hubungan Tiongkok dengan Afrika berawal dari pinjaman uang oleh Tiongkok dengan berbagai persyaratan. Salah satu negara di Afrika yang diambil sumber dayanya adalah negara Madagaskar di Afrika Selatan. Negara tersebut sangat kaya akan sumber mineral salah satunya adalah mika, hal ini membuat Tiongkok tertarik untuk melakukan investasi ke negara tersebut dengan cara bekerjasama dengan perusahaan lokal. Mika sendiri merupakan salah satu jenis mineral yang diproses melalui penambangan. Sifatnya yang ringan, kuat, tahan terhadap perubahan suhu, fleksibel, memantulkan cahaya dan melawan sinar ultraviolet menjadikannya sebagai mineral dengan permintaan tinggi. Mika dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari cat air, kosmetik hingga peralatan elektronik.<sup>52</sup>

Terjadinya peningkatan kebutuhan pasokan sumber daya Tiongkok secara signifikan di kawasan Afrika dilakukan guna menunjang kebutuhan membangun kota hijau disamping keinginannya untuk menguasai perekonomian dunia. Negara-negara Afrika kemudian hadir sebagai negara dengan komoditas ekspor sumber daya mentah termasuk energi yang cukup efektif dan murah.<sup>53</sup> Kemudian Tiongkok memanfaatkan hal tersebut untuk mempermudah berdagang dengan negara-negara Afrika. Tiongkok menggunakan hutang negara sebagai alat kontrol untuk harga dagang energi dan minyak dengan tujuannya untuk menciptakan jalur-jalur konektivitas distribusi sumber daya.

Madagaskar kemudian muncul sebagai negara dengan komoditas ekspor sumber daya mentah termasuk energi yang cukup efektif dan murah. Dalam hal ini, Tiongkok kemudian memanfaatkan negara tersebut dengan menggunakan hutang negara sebagai alat kontrol untuk harga mineral yang tujuannya untuk mendapatkan sumber daya sebanyak-banyaknya.

---

<sup>51</sup> Nathanael.

<sup>52</sup> Marten Hanura Ratu Fadilah Audzitni Rao, Ika Riswanti Putranti, 'Kerjasama Ekonomi Cina-Madagaskar : Eksploitasi Anak Sebagai Pekerja Pada Pertambangan Mika', *Journal of International Relations*, 8 (2022), 1–23.

<sup>53</sup> Ratu Fadilah Audzitni Rao, Ika Riswanti Putranti.

Berdasarkan penelitian, sekitar tahun 2017 sumber daya alam baik dalam bentuk mentah (seperti mineral dan metal) maupun olahan (bahan bakar) menempati dua posisi tertinggi dalam komoditas ekspor Afrika ke Tiongkok, ini menggantikan Amerika Serikat sebagai mitra dagang terbesar negara-negara Afrika.<sup>54</sup>

Segala bentuk kegiatan eksploitasi Tiongkok ke negara-negara tersebut tentunya dilakukan untuk memenuhi semua kebutuhan dalam negerinya. Terlebih saat ini digencarkan pembangunan kota hijau. Walaupun pada konsepnya kota hijau ini dibangun dengan tujuan menghemat energi, namun pada prakteknya Tiongkok tidak bisa lepas dari kebutuhan sumber daya yang tinggi, walaupun Tiongkok sudah berusaha membangun citranya dengan menutup industri kotor dan beberapa tambang dalam negerinya. Pada akhirnya Tiongkok membentuk kebijakan baru dengan memindahkan industrinya ke negara lain, hal ini seakan-akan membuat Tiongkok datang untuk komitmen perbaikan lingkungan untuk Tiongkok yang hijau namun satu sisi Tiongkok membuat beberapa negara mengalami kerugian.

## KESIMPULAN

Isu kerusakan lingkungan di Tiongkok muncul ketika kegiatan ekonomi dan industri Tiongkok sedang berkembang pesat. Karena kegiatan ekonomi dan industri yang sangat tersebut membuat Tiongkok sangat bergantung dengan penggunaan batu bara dan energi lain yang tidak terbarukan, hal ini membuat Tiongkok menjadi negara dengan konsumsi batu bara nomor 1 di dunia.

Kerusakan lingkungan tersebut mendorong Tiongkok untuk merubah konsep pembangunannya dengan konsep pembangunan *Green City*. *Green City* dapat dikatakan sebuah pembangunan hijau ramah lingkungan dan selaras dengan kehidupan manusia dan alam. Tiongkok dipacu untuk mengurasi emisi karbonnya yang tinggi dan dengan tekanan internasional juga memaksa Tiongkok untuk bertanggungjawab terhadap kerusakan lingkungan yang telah dibuat.

Tekanan dari berbagai negara membuat Tiongkok harus berpikir keras, dimana Tiongkok harus bisa mengurangi penggunaannya yang tinggi dan satu sisi Tiongkok harus terus membangun ekonomi dan industri dalam negerinya. Tiongkok mulai menawarkan solusi dengan mulai bergabung dalam CDM dan juga melakukan kerjasama internasional dengan negara lain seperti Indonesia dan negara-negara di Afrika.

## REFRENSI

Adhi, Bhaskara, 'Ekspansi Proyek OBOR Cina, Indonesia Diminta Waspada Jebakan Utang', *Tirto ID*, 2019, p. 1 <<https://tirto.id/ekspansi-proyek-obor-cina-indonesia-diminta-waspada-jebakan-utang-dnpo>> [accessed 22 June 2023]

*An Energy Sector Roadmap to Carbon Neutrality in China, An Energy Sector Roadmap to Carbon Neutrality in China, 2021* <<https://doi.org/10.1787/5f517ddb-en>>

---

<sup>54</sup> Meta Yuliantika, 'Analisis Kerjasama Ekonomi China Dengan Negara-Negara Di Afrika', *Journal of International Relations*, 8 (2021), 49.

- Azizah, Nurul, 'Kebijakan Cina Terhadap Proyek Clean Development Mechanism Di Sektor Energi Terbarukan: Kasus Huitengxile Wind Farm' (Universitas Airlangga, 2016) <<http://lib.unair.ac.id>>
- Baylis, John, and Steve Smith, *The Globalization of World Politics 2nd Edition*, 2001
- Chotimah, Hidayat Chusnul, 'Analisis Strategi Keamanan Energi Cina Dalam Upaya Penurunan Emisi Karbon Melalui Pendekatan Konstruktivisme', *Global: Jurnal Politik Internasional*, 19.1 (2017), 29 <<https://doi.org/10.7454/global.v19i1.145>>
- Gromico, A, S Indriastuti, and L D Erianti, 'Ancaman Polusi Lingkungan China Terhadap Human Security Di Jepang (China's Pollution Threat to Human Security in Japan)', *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 1 (2013), 1–7
- Gusman, Dori, and Tri Joko Waluyo, 'Peran Greenpeace Dalam Penanganan Kerusakan Lingkungan (Polusi Udara Dan Air) Di China', *Jurnal Transnasional*, 6.2 (2015), 1662–74
- Hennida, Citra, 'Upaya Tata Kelola Lingkungan Di Cina: Hambatan-Hambatannya', *Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga*, 2014, 289–304
- Huang, Wei, Bing Gao, Shenghui Cui, Yunfeng Huang, Xiangtong Zhang, Yusheng Shen, and others, 'Evaluating Green City Development in China Using an Integrated Analytical Toolbox', *Journal of Cleaner Production*, 400 (2023), 136703 <<https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2023.136703>>
- Huaxia, 'China Focus: China Issues White Paper on Green Development', *Xinhua*, 2023
- Jill Steans, Lloyd Pettiford, 'Introduction to International Relations', *The American Catholic Sociological Review*, 15.3 (2005), 279–301 <<https://doi.org/10.2307/3708196>>
- Jun Wan, 'Environmental Planning in China (1949-Present)', in *Beautiful China: 70 Years Since 1949 and 70 People's Views on Eco-Civilization Construction* (Singapore: China Environment Publishing Group, Co., Ltd, 2021), pp. 509–16 <[https://doi.org/10.1007/978-981-33-6742-5\\_50](https://doi.org/10.1007/978-981-33-6742-5_50)>
- Lant, Karla, 'China Has Officially Started Construction on the World's First "Forest City"', *Futurism*, 2017, p. 1 <<https://futurism.com/china-has-officially-started-construction-on-the-worlds-first-forest-city>> [accessed 20 June 2023]
- Lindfield, Michael and Florian Steinberg, *Green Cities*, ed. by Michael Lindfield and Florian Steinberg, 1st edn (Mandaluyong City: Asian Development Bank, 2012)
- Matthew Paterson, 'Green Politics', *Green History*, 2010, 227–38 <[https://doi.org/10.4324/9780203410134\\_chapter\\_18](https://doi.org/10.4324/9780203410134_chapter_18)>
- Nathanael, Garcia Krisnando, 'Kerjasama Luar Negeri Indonesia Dan China: Studi Kasus Ekspor Batubara', *Jurnal Mandala Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 3 (2020), 203–19 <<https://doi.org/10.33822/mjih.v3i2.2320>>
- Olivia, Yessi, 'Level Analisis Sistem Dan Teori Hubungan Internasional', *Jurnal Transnasional*, 5.1 (2013), 896–912 <<https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/1796>>
- Pramono Dwi Susetyo, 'Bisakah Mencapai Target Dekarbonisasi?', 2022

<<https://www.forestdigest.com/detail/2068/dekarbonisasi>> [accessed 17 January 2023]

- Rakasiwi, Diva, 'Faktor - Faktor Yang Menghambat Kebijakan Perlindungan Lingkungan Di China', *Jurnal Hubungan Internasional*, 2015 <<https://repository.unair.ac.id/17611/1/1.HalamanJudul.pdf>>
- Ratu Fadilah Audzitni Rao, Ika Riswanti Putranti, Marten Hanura, 'Kerjasama Ekonomi Cina-Madagaskar : Eksploitasi Anak Sebagai Pekerja Pada Pertambangan Mika', *Journal of International Relations*, 8 (2022), 1–23
- Sarker, Md. Nazirul Islam, Md. Altab Hossin, Yin Xiao Hua, Jhensanam Anusara, Srichiangrai Warunyu, Bouasone Chanthamith, and others, 'Low Carbon City Development in China in the Context of New Type of Urbanization', *Low Carbon Economy*, 09.01 (2018), 45–61 <<https://doi.org/10.4236/lce.2018.91004>>
- Sidabutar, Ruth Marlin Grace, 'Tekanan Internasional Dan Respon Kebijakan Luar Negeri: China's Peaceful Development Dalam Isu Lingkungan Global Dan Pembangunan Ekonomi Negara', *Social and Politic Science*, 1 (2020), 3
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, ed. by Sutopo, ALFABETA, 2nd edn (Bandung: ALFABETA, 2019)
- Swastika, Bunga Ayu, 'Upaya Pemerintah China Dalam Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Cdm ( Clean Development Mechanism ) Sebagai Bentuk Implementasi Protokol Kyoto ( Efforts of Chinese Government in Reduction of Greenhouse Gas', *UNEJ Journal*, 1.1 (2014), 1–14
- Upaya Pemerintah China Dalam Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Melalui CDM (Clean Development Mechanism) Sebagai Bentuk Implementasi Protokol Kyoto*, 2017
- Tanjung, Moch Iqbal, *Kerjasama Pemerintah Indonesia - Jepang Dalam Implementasi Mekanisme Protokol Kyoto* (Jakarta, 2013)
- Virginie, and Shannon Zheng Maisonneuve, 'How China Can Achieve Its Ambitious Decarbonisation Plan', *Allianz Global Investors* (Beijing, 2022), p. 3 <<https://www.allianzgi.com/en/insights/outlook-and-commentary/ambitious-decarbonisation-plan>>
- Wijaya Husein, Adriansyah; Darwis; Abdullah, 'Efektivitas Tripartite Environment Ministers Meeting (TEMM) Terhadap Penanggulangan Masalah Lingkungan Di Tiongkok, Jepang Dan Korea Selatan', *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 1.1 (2021), 74–100 <<https://journal.unhas.ac.id/index.php/hujia/article/view/12723/6425>>
- Yordan, Gunawan, 'Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Asap Lintas Batas Negara Pasca Ratifikasi Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution', *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* (Universitas muhammadiyah Yogyakarta, 2017)
- Yuliantika, Meta, 'Analisis Kerjasama Ekonomi China Dengan Negara-Negara Di Afrika', *Journal of International Relations*, 8 (2021), 49–73
- Zhangrui, 'China's "green Miracles" Highlight Xi's Vision of Ecological Civilization', *Xinhua*, 2022